

PENGARUH INSENTIF EKSEKUTIF, *CORPORATE RISK* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* PADA *TAX AVOIDANCE*

Gusti Ayu Pradnyanita Dewi¹
Maria M. Ratna Sari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: ayupradnyanita@gmail.com / telp: +62 81 93 60 30 948

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk* dan *corporate governance* pada *tax avoidance*. Jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 165 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data penelitian mempergunakan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan *corporate risk* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Kata kunci: *tax avoidance, corporate governance*

ABSTRACT

Tax avoidance is tax evasion efforts to comply with taxation and use strategies in the field of taxation that are used . This study has purpose to determine the influence of executive incentive, corporate risk, and corporate governance against tax avoidance. The number of samples analyzed 165 samples of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2013. Method for this study was purposive sampling. Research data analysis using multiple linear regression. Result of analysis showed a negative effect on the risk of corporate tax avoidance. Executive incentives, institutional ownership, independent directors and audit committee has no effect on tax avoidance. While audit quality has positive influence on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, corporate governance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber yang paling potensial dalam penerimaan negara. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Peranan pajak dalam pendapatan negara sangat dominan dan mencapai lebih dari 70 persen setiap

tahunnya. Bahkan pada tahun 2013, penerimaan pajak dalam APBN mengambil porsi lebih dari 78 persen dari pendapatan negara (www.bppk.depkeu.go.id).

Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang di bidang perpajakan. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Insentif eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik keagenan antara *principal* dan *agent*. Insentif eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan.

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan

melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) serta Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Coles *at al.*, (2004) menyebutkan risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter *risk taking* atau *risk averse*. Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang.

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan dengan konsep *good corporate governance* (GCG). GCG ialah mekanisme pengaturan dan pengendalian perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Fhadilah (2014) mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Keberadaan kepemilikan oleh investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja *insider* (Jensen dan Meckling, 1976). Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa (2011)

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, persentase jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota komisaris. Dapat dikatakan bahwa komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan Annisa (2011) menyimpulkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008). Komite audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan pihak manajemen. Pohan (2008) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Dalam penerapan *corporate governance* kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya.

Penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Berkaitan dengan penghindaran pajak dan variabel yang mempengaruhinya, terdapat fenomena bahwa berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany ada 4000 perusahaan PMA pada tahun 2012 nihil nilai pajaknya. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Pranata dkk., 2013). Hal lain yang mendukung dugaan terjadinya penghindaran pajak yaitu dengan data penelitian yang mengungkapkan bahwa perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT Merck Tbk yang memiliki omzet 1,1 Triliun melaporkan pembayaran pajak 58 Milyar dan 57 Milyar. Namun perusahaan lain seperti PT Sekar Bumi Tbk dan Kedawung Setia Industrial Tbk yang memiliki omzet sebesar 1,2 Triliun dan 1,3 Triliun melaporkan pembayaran pajak lebih rendah dari perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT Merck Tbk., yaitu hanya sejumlah 2,3 Miliar dan 13,4 Miliar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses laporan keuangan tahunan dan tanggal publikasi laporan keuangan melalui www.idx.co.id pada tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2014. Populasi penelitian ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun 2011-2013. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan sampel sebanyak 55 perusahaan.

Dyreng *et al.*, (2010) menyatakan bahwa variabel *tax avoidance* dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan, yaitu pembagian antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CASH ETR yaitu:

$$CASH\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \dots\dots\dots(1)$$

Semakin tinggi CASH ETR ini memiliki indikasi semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Amstrong *et al.*, (2012) mengatakan bahwa variabel terikat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total kompensasi yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam setahun.

Paligrova (2010) menyatakan bahwa risiko perusahaan dapat diukur dengan cara menghitung standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Rumus standar deviasi yang dimaksud yaitu:

$$RISK = \sqrt{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2 / (T - 1)} \dots\dots\dots(2)$$

Khurana (2009) menyatakan bahwa persentase kepemilikan institusional (KI) dihitung dengan rumus:

$$KI = \frac{proporsi\ saham\ dimiliki\ institusi}{jumlah\ saham\ yang\ diterbitkan} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Pengukuran variabel dewan komisaris menggunakan persentase dewan komisaris yang terdapat dalam suatu perusahaan (Sillagan, 2006). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\% \dots (4)$$

Komite audit. Penelitian ini menggunakan jumlah komite audit di suatu perusahaan sebagai alat ukur.

Pengukuran kualitas audit berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *The Big Four* (*Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y*) dalam mengaudit laporan keuangannya pada penelitian ini akan diberi nilai 1, apabila tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menyajikan deskripsi variabel penelitian. Deskripsi variabel penelitian memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian yang terdiri atas jumlah pengamatan, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata	Standar Deviasi
Insentif Eksekutif	165	0,000	0,394	0,012	0,033
Risiko Perusahaan	165	0,008	0,486	0,089	0,075
Kepemilikan Institusional	165	0,322	1,000	0,703	0,171
Komisaris Independen	165	0,250	1,000	0,393	0,126
Komite Audit	165	2,000	5,000	3,127	0,471
Kualitas Audit	165	0,000	1,000	0,461	0,500
<i>Tax Avoidance</i>	165	0,001	0,967	0,296	0,158

Sumber: Data diolah, 2014

Nilai tertinggi insentif eksekutif sebesar 0,394 dan nilai terendah sebesar 0,000. Insentif eksekutif dengan nilai rata-rata sebesar 0,012 mempunyai arti bahwa rata-rata insentif eksekutif tiap-tiap perusahaan manufaktur yang diteliti sebesar 0,012. Nilai standar deviasi insentif eksekutif sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai insentif eksekutif pada nilai rata-ratanya sebesar 0,033. Risiko perusahaan dengan nilai rata-rata sebesar 0,008 dan nilai tertinggi sebesar 0,486. Nilai rata-rata risiko perusahaan sebesar 0,089 yang mempunyai arti bahwa rata-rata standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan sebesar 0,089. Nilai standar deviasi risiko perusahaan sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai risiko perusahaan yang diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 0,075. Kepemilikan institusional memiliki nilai tertinggi sebesar 0,322 dan nilai terendah sebesar 1,000. Kepemilikan institusional dengan nilai rata-rata sebesar 0,703 yang berarti bahwa rata-rata persentase proporsi saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan sebesar 0,703 atau 70,3 persen (70,3%). Nilai standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,171. Hal ini berarti terdapat perbedaan nilai

kepemilikan institusional pada nilai rata-ratanya sebesar 0,171. Nilai terendah komisaris independen sebesar 0,250 dan nilai tertinggi sebesar 1,000. Nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,393 yang mempunyai arti bahwa rata-rata proporsi anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan sebesar 0,393 atau 39,3 persen (39,3%). Nilai standar deviasi komisaris independen sebesar 0,126 memiliki arti terdapat perbedaan nilai komisaris independen yang diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 0,126. Komite audit dengan nilai terendah 2,000, nilai tertinggi sebesar 5,000. Nilai rata-rata komite audit sebesar 3,127 yang mempunyai arti bahwa rata-rata jumlah komite audit yang terdapat di perusahaan yang diteliti sebanyak tiga orang. Nilai standar deviasi komite audit sebesar 0,471 memiliki arti terdapat perbedaan nilai komite audit yang diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 0,471. Nilai terendah kualitas audit sebesar 0,000 dan nilai tertinggi sebesar 1,000. Nilai rata-rata kualitas audit adalah sebesar 0,461. Kualitas audit dengan standar deviasi sebesar 0,500 artinya terdapat perbedaan nilai kualitas audit yang diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 0,500. *Tax avoidance* dengan nilai terendah 0,001 dan nilai tertinggi sebesar 0,967. Nilai rata-rata *tax avoidance* sebesar 0,296 yang berarti bahwa rata-rata pembayaran pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak sebesar 0,296. Standar deviasi *tax avoidance* adalah 0,158. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai *tax avoidance* yang telah diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 0,158.

Model regresi digunakan untuk memprediksi agar hasil penelitian tidak bias. Namun sebelum itu, perlu dilakukan uji kelayakan model yang dibuat

dengan uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan menggunakan metode P-Plot menunjukkan bahwa penyebaran data penelitian ini mengikuti grafik Normal P-Plot. Hal ini berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji autokorelasi diketahui dari nilai Durbin-Watson, yaitu sebesar 1,640 dengan tingkat signifikan 5 persen, untuk jumlah sampel sebanyak 165 dan variabel bebas berjumlah 6, nilai $d_L=1,670$ dan $d_U=1,821$. Nilai d statistik sebesar 1,640 berada pada wilayah yang tidak mengandung autokorelasi, sehingga model layak digunakan untuk memprediksi.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>
(Constant)		
Insentif Eksekutif	0,962	1,039
Risiko Perusahaan	0,812	1,232
Kepemilikan Institusional	0,900	1,112
Komisaris Independen	0,910	1,099
Komite Audit	0,881	1,135
Kualitas Audit	0,738	1,355

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 2 menunjukkan bahwa *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 yang mengandung arti bahwa tidak terjadi gejala multikolinier dari model yang telah dibuat, sehingga model ini layak untuk memprediksi.

Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatter Plot. Tidak terdapat pola yang terbentuk di Grafik Scatter menunjukkan bahwa titik-titik yang ada menyebar tidak beraturan, sehingga tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dengan signifikansi sebesar 5%.

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda

Keterangan	F	Signifikansi
Regression	3,559	0,002

Keterangan	Nilai Beta	Signifikansi
(Constant)	0,522	0,000
Insentif Eksekutif	-0,188	0,605
Risiko Perusahaan	-0,673	0,000
Kepemilikan Institusional	0,033	0,652
Komisaris Independen	-0,116	0,241
Komite Audit	-0,039	0,150
Kualitas Audit	0,056	0,045
<i>Adjusted R Square</i>		0,086

Sumber: Data diolah, 2014

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) = 0,086 mempunyai arti bahwa 8,6 persen variasi dari *tax avoidance* dipengaruhi oleh variasi insentif eksekutif, risiko perusahaan, dan *corporate governance*, sedangkan 91,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam persamaan tersebut. Uji signifikansi simultan (Uji F) bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi yang terbentuk. Apabila nilai signifikansi ($\text{sig} \leq 0,05$) maka variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil perhitungan dari uji F menunjukkan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti model layak digunakan untuk menguji variabel independen pada variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = 0,522 - 0,188X_1 - 0,673X_2 - 0,033X_3 - 0,116X_4 - 0,039X_5 + 0,056X_6 \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,522 mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas (insentif eksekutif, risiko perusahaan, dan *corporate governance*) konstan, mengakibatkan nilai dari *tax avoidance* adalah sebesar 0,522. Koefisien insentif eksekutif -0,188 mempunyai arti bahwa apabila insentif eksekutif meningkat sepuluh persen menyebabkan *tax avoidance* cenderung menjadi lebih menurun 1,88 dengan asumsi faktor lainnya konstan. Koefisien sebesar -0,673 atas risiko perusahaan mempunyai arti bahwa apabila standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset meningkat sepuluh persen akan menyebabkan *tax avoidance* cenderung menjadi lebih kecil 6,73 dengan asumsi faktor lainnya konstan. Kepemilikan institusional nilai koefisien -0,033 mempunyai arti bahwa apabila kepemilikan institusional naik sepuluh persen menyebabkan *tax avoidance* cenderung menjadi lebih kecil 0,33 dengan asumsi faktor lainnya konstan. Koefisien komisaris independen sebesar -0,116 mempunyai arti bahwa apabila jumlah komisaris independen bertambah satu orang menyebabkan *tax avoidance* cenderung menurun sebesar 0,116 dengan asumsi faktor lainnya konstan. Komite audit sebesar -0,039 mempunyai arti bahwa apabila jumlah komite audit bertambah satu orang menyebabkan *tax avoidance* cenderung menurun sebesar 0,039 dengan asumsi faktor lainnya konstan. Koefisien kualitas audit sebesar 0,056 mempunyai arti bahwa apabila KAP yang melakukan audit pada perusahaan KAP *The Big Four* menyebabkan *tax avoidance* bertambah 0,056 dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Jumlah insentif yang mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sistem kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk memotivasi eksekutif melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini memperkuat penelitian Puspita (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak perusahaan. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Irawan dan Farahmita (2012) yang menyimpulkan tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif pada perusahaan.

Corporate risk berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki risiko perusahaan yang tinggi cenderung akan menyajikan laporan keuangan apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012) serta Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, karakter eksekutif dapat diketahui menggunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan.

Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Kepemilikan oleh investor-investor institusional belum tentu mampu memberikan kontrol untuk menghindari manajemen melakukan penghindaran pajak. Hal ini

bisa saja disebabkan karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Hal ini mendukung penelitian Fadhilah (2014) dan Isnanta (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa (2011) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Bertambahnya anggota dewan komisaris independen mungkin dimaksudkan mematuhi regulasi yang ditetapkan, namun pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Hal ini memperkuat penelitian Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan variabel komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Annisa (2012) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Jumlah komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumlah komite audit pada perusahaan sudah sesuai dengan standar BEI, yaitu komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang. Hal ini bisa juga disebabkan oleh cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk

variabel komite audit cenderung homogen atau tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada *tax avoidance*. Hasil penelitian memperkuat hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2012) yang menemukan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Pohan (2008) yang memperoleh hasil bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*.

Kualitas audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin baik kualitas audit maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan karena meskipun perusahaan menggunakan jasa KAP *The Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, namun hal itu tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena fungsi auditor hanya untuk menguji kewajaran informasi laporan keuangan suatu perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian Annisa (2012) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fadhilah (2014) yang memperoleh hasil kualitas audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis ini memiliki kesimpulan bahwa *corporate risk* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Semakin tinggi *corporate risk*, maka *tax avoidance* akan semakin rendah. Insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris

independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, dapat diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada perusahaan non manufaktur, seperti perusahaan jasa, sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena saat ini perusahaan tersebut menjadi target sasaran pengawasan ketat Dirjen Pajak. Selain itu penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan dan *leverage*. Rentang waktu penelitian sebaiknya diperpanjang untuk mengetahui pengaruh penelitian dalam jangka panjang dan didapatkan prediksi yang lebih tepat.

REFERENSI

- Amstrong, C. S., Jennifer L. B., dan David F. Larcker. (2012). *The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics* 53: 391-411.
- Andriyani, Ni Ketut. 2008. Pengaruh *Investment Opportunity Set (IOS)*, Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* pada *Tax Avoidance*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Pada Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

- Coles, Jeffrey L. et al., 2004. *Managerial Incentives And Risk-Taking, The Accounting Review*, J-33.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Dyreg, Scott Det al., 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Pada *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Universitas Negeri Padang.
- Irawan, Hendra Putra dan Farahmita, Aria. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Pada Manajemen Pajak Perusahaan. Universitas Indonesia, Depok.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol 3, No 4.*
- Juliarini, Aniek. 2013. <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/8233-haruskah-umkm-menopang-apbn>. Diunduh tanggal 15 Juli 2014.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. Universitas Udayana, Bali.
- Natawidnyana. 2008. *International Financial Reporting Standards (IFRS): A Brief Description*. <http://natawidnyana.wordpress.com/2008/10/28>. Diakses pada 22 Juli 2014.
- Paligorova, Teodora. 2010. *Corporate Risk Taking and Ownership Structure, Bank of Canada Working Paper, 2010-3.*
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio Tobin Q, Perata Laba Pada Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Pranata, Febri Mashudi, dkk. 2013. Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Universitas Bung Hatta, Padang.

Puspita, Slivia Ratih dan Harto, Puji. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. Universitas Diponegoro, Semarang.

Sillagan, H, dan M. Machfoedz. 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akutansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang.